

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Surabaya, kota dengan populasi waria tertinggi menurut data dari Departemen Kesehatan tahun 2009 (Rahmanty, 2013), menemukan waria bukanlah hal yang sulit. Jalan Irian Barat misalnya adalah tempat yang populer sebagai tempat *mèjèng* waria pekerja seks. Selain itu, waria biasanya dapat ditemui sebagai pemilik/pekerja salon atau penghibur seperti penari (ular, kabaret, tradisional); dan bahkan waria dapat ditemui di ruang UPIPI (Unit Perawatan Intermediet Penyakit Infeksi) RSUD Dr. Soetomo sebagai relawan yang merawat ODHIV (orang dengan HIV), atau dapat pula ditemui sebagai fasilitator pelatihan, terutama untuk isu HIV dan AIDS. Akan tetapi, meskipun dapat diterima dalam masyarakat, banyak waria mengalami hambatan dalam hidupnya, terutama untuk mendapatkan pekerjaan, [terutama] di sektor formal (Hartoyo et al, 2014). Pilihan kerja yang terbatas bagi waria inilah yang membuat banyak waria bekerja sebagai pekerja seks (Boellstorf, 2004; Koeswinarno, 2004; Tempo *online*, 2012); meskipun pekerjaan yang secara hukum dikategorikan ilegal ini kerap mendatangkan bahaya.

Premanisme dan razia yang dilakukan pihak satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah ancaman utamanya. Seorang waria bernama Linda yang biasa *mèjèng* di Irian Barat (Irba) mengaku pernah ditikam oleh preman hingga harus dilarikan ke RS Siloam ketika sedang bekerja. Sedangkan, seorang waria asal Makassar yang juga biasa *mèjèng* di Irba, pernah harus menceburkan diri ke sungai di dekat Irba ketika tiba-tiba satpol PP melakukan operasi razia, padahal ia tak bisa berenang. Ia kemudian selamat karena ditolong oleh seorang supir truk (Catatan lapangan, 12 Agustus 2014). Lalu, di sepanjang Jalan Margomulyo sisi sebelah kanan (bila kita dari arah Tandes) atau sisi sebelah kiri (bila kita dari arah Kalianak),

salah satu lokasi *mèjèng*<sup>1</sup> waria di daerah Surabaya Barat, setelah tiga tahun tak pernah ada razia, tiba-tiba di suatu malam di awal November 2014 terjadi razia (wawancara Feby, 08 November 2014)<sup>2</sup>. Bahkan seorang waria yang tak kerja seks pernah dicakup<sup>3</sup> oleh petugas satpol PP karena anggapan umum tentang waria sebagai pekerja seks, sebagaimana kisah seorang waria asal Gresik yang saya temui saat perayaan Hari AIDS Sedunia tahun 2014 di CBO<sup>4</sup> Blok M, salah satu kelompok berbasis komunitas di bawah naungan Yayasan Ekspresi Warna Surabaya<sup>5</sup> atau dikenal dengan Perwakos. Ia mengatakan ditangkap satpol PP ketika sedang makan malam di sebuah warung di daerah Sememi. Saat ditangkap, ia mengatakan pada petugas yang menangkapnya bahwa ia baru saja mengunjungi temannya yang bertempat tinggal di wilayah itu, tetapi petugas tetap membawanya ke Liponsos<sup>6</sup>. Di sana, ia jelaskan kembali pada petugas lain bahwa ia bukanlah pekerja seks. Ia kemudian menunjukkan kartu asosiasi gurunya. Petugas itu akhirnya mau menerima fakta bahwa ia bukanlah pekerja seks. Ia lantas diizinkan untuk menghubungi keluarganya, tetapi tetap harus menginap semalam di Liponsos dengan alasan birokrasi. Ia pun dibebaskan keesokan harinya (catatan lapangan, 01 Desember 2014).

<sup>1</sup> Mengacu pada tempat di mana waria menjajakan diri, biasanya di jalanan.

<sup>2</sup> Malam itu, 08 November 2014 saat saya berkunjung ke Margomulyo, beberapa waria yang sedang *mèjèng* menceritakan pada saya tentang kekhawatiran mereka pada razia. Di lokasi *mèjèng* Margomulyo, razia kembali ada setelah selama tiga tahun tidak pernah ada (wawancara Feby, 08 November 2014). Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh para waria yang *singam* (mengamen) di area eks lokalisasi Klakahrejo. Di sebuah warung tempat waria pengamen biasa berkumpul untuk membagi uang hasil mengamen, Dona, seorang waria yang menjadi primadona di wisma-wisma musik yang berlokasi di Klakahrejo mengatakan pada Feby bahwa ia tak berani mengamen hingga malam karena khawatir ada razia. Yang ia maksud dengan malam adalah hingga sirene, tanda bagi wisma-wisma musik untuk menghentikan kegiatannya, berbunyi tepat pukul 00:00.

<sup>3</sup> Dicakup, dari kata dasar cakup, adalah istilah yang biasa digunakan waria untuk mengacu pada istilah ditahan dalam operasi razia.

<sup>4</sup> CBO adalah singkatan dari *Community Based Organization*, istilah yang digunakan oleh Perwakos untuk menyebut kelompok-kelompok yang mereka bentuk beradarkan wilayah kerja. CBO adalah istilah yang biasa digunakan dalam isu pembangunan, dan dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan organisasi berbasis komunitas.

<sup>5</sup> Nama resmi untuk Perwakos yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia.

<sup>6</sup> Liponsos atau Lingkungan Pondok Sosial adalah tempat penampungan bagi mereka yang dikategorikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh pemerintah, yang dikelola oleh Dinas Sosial. Keterangan lanjut tentang PMKS dapat dibaca di Permensos No. 8 Tahun 2012. Untuk lokasi Liponsos kota Surabaya ada di Jalan Keputih Tegal No. 32.

Penertiban terhadap waria tidaklah terlepas dari bagaimana kota sebagai sebuah ruang diproduksi. Dalam penelitiannya tentang Pataya, tempat *ngèbèr*<sup>7</sup> laki-laki gay yang terletak di daerah sekitar jalan Kangean, Kathleen Azali (2012: 86) menyebutkan:

“Perubahan tata ruang, seperti penebangan pohon dan penghilangan semak-semak, serta penerangan yang kemudian mengurangi keterlindungannya, menyebabkan perubahannya sebagai salah satu tempat *ngèbèr* utama di Surabaya, yang perlu diteliti lebih lanjut. Alasan keamanan dan tingkat kriminalitas yang meningkat (jika memang benar demikian) tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan menurunnya jumlah pengunjung dan perubahan perilaku di Pataya karena, narasi mengenai bahaya dan kriminalitas yang terjadi di tempat-tempat *ngèbèr* sudah muncul jauh sebelum masa Pataya sedang hidup-hidupnya di tahun 2005.”

Dengan pernyataan tersebut, Azali (2012) menduga bahwa ada keterkaitan antara perubahan tata ruang dengan aktivitas seksual di ruang publik kota. Dalam artikel ilmiahnya mengenai ekspresi homoseksualitas di Singapura, Lim (2004) mengemukakan bahwa ruang kota adalah proyeksi dari kelompok dominan. Ruang kota bukan saja persoalan tentang banyaknya tumpukan bata, baja, beton; tetapi ada sebagai proyeksi dan representasi, dan [memuat] pengalaman-pengalaman (Donald, 1997: 82 [Lim, 2004: 1762]). Inilah yang seringkali menjadi kajian para geografer queer<sup>8</sup>. Mereka berpendapat bahwa aturan mengenai identitas gender dan seksual memproduksi cara-cara khusus yang mengimajinasikan dan sebagai konsekuensinya mengartikulasikan ekspresi individu dalam ruang publik; sehingga menjadi alasan kenapa terjadi pembersihan moral (*moral cleansing*) di jalanan-jalanan [kota] misalnya (Montigny, 2013: 12). Di kota Surabaya, penertiban terhadap pekerja seks di jalanan, baik perempuan maupun waria, adalah salah satu wujud dari imajinasi heteronormatif tentang kepantasan aktivitas seksual, yaitu dilakukan di bawah ikatan pernikahan sesuai yang tercantum pada UU No. 1 Tahun 194 tentang Perkawinan.

Selain itu, norma heteroseksual dalam tataran yang sederhana juga dapat dilihat dari ketiadaan fasilitas umum seperti toilet untuk waria. Bahkan di Taman Remaja Surabaya

<sup>7</sup> Ngèbèr adalah tempat yang diasosiasikan dengan tempat berkumpul laki-laki gay untuk nongkrong (Boellstorff, 2005: 144; Ibhoe, 2003 [dalam Azali, 2012: 79]).

<sup>8</sup> Istilah ini digunakan Montigny (2013) untuk mengacu pada ahli geografi yang memfokuskan kajian pada keberagaman seksualitas beserta interseksinya. Misalkan ketika meneliti komunitas lesbian, mereka akan mempertimbangkan lesbian dari kelas sosial apa, ras apa, dan sebagainya.

(TRS) saat waria *show* masih diselenggarakan tiap Kamis malam, toilet untuk laki-laki hanya akan ditambahi garis miring menjadi pria/waria (Boellstorf, 2004; Kusumastuti, 2008) yang berarti waria harus menggunakan toilet laki-laki, walaupun mereka merasa tidak nyaman (Kusumastuti, 2008). Atau mereka diarahkan untuk menggunakan toilet perempuan karena tampilan mereka dianggap lebih mirip perempuan (wawancara Irma, 27 Mei 2014). Persoalan toilet ini semakin meneguhkan binerisme gender; dan dalam hal ini waria berada dalam binerisme sekunder dari jantan (*male*). Boellstorf (2004: 181)

Namun, meskipun ruang dibangun dengan sistem gender yang biner, hal yang menarik adalah bahwa waria atau orang-orang non-heteroseksual lainnya tidaklah serta-merta kehilangan ruangnya. Toilet bisa saja menghilangkan posisi mereka sebagai subyek atau posisi mereka menjadi sekunder di bawah subyek utama, tetapi ada lokasi-lokasi di kota di mana posisi mereka dapat ditemui sebagai subyek yang utama, atau mereka berada di antara subyek-subyek lainnya. Artinya, walaupun kota membatasi mereka yang dianggap menyimpang dari norma dominan, mereka yang dianggap menyimpang ini tetap dapat ditemui dalam ruang-ruang kota. Philips et al (2000 [dalam Lim, 2004: 1761] mengemukakan, “Hanya di kota-kota modern, kelompok-kelompok yang ditekan dapat membentuk komunitas secara inklusif”. Artinya, orang-orang yang ditekan oleh karena gender dan seksualitasnya tidak memenuhi norma yang dominan tidak lantas tunduk pada norma tersebut, tetapi melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan subyektifitasnya dalam kondisi tersebut.

Hal tersebutlah—mempertahankan subyektifitas dalam kondisi yang menentang—yang ditelusuri oleh Tyler dan Cohen (2010) pada penelitiannya mengenai performativitas gender dan ruang organisasional<sup>9</sup>. Penelitian Tyler dan Cohen ini diinspirasi dua peristiwa yang terjadi secara tidak disengaja. Pertama, kunjungan seorang kolega perempuan ke kantor mereka di Sekolah Bisnis Universitas Loughborough, Inggris. Kolega itu mengatakan

---

<sup>9</sup> Ruang organisasional mengacu pada ruang di tempat kerja (formal) seperti kantor. Tyler dan Cohen (2010) meneliti mengenai pengalaman spasial perempuan yang bekerja di Universitas Loughborough, London, Inggris.

bahwa memasang foto keluarga dan hasil gambaran anak-anak di kantor universitas bukanlah tindakan yang profesional dan secara mendasar anti-feminis. Tyler dan Cohen terkejut dengan pendapat tersebut, karena bagi mereka, foto keluarga dan hasil gambaran anak-anak dapat memunculkan nuansa cerah di kantor dan memberikan sentuhan ‘manusia’; tetapi kolega tersebut tetap bersikeras menganggap tindakan itu menunjukkan ketidakseriusan sebagai seorang akademisi. Lalu, suatu hari secara kebetulan, mereka menyaksikan seni instalasi berjudul *Grey Area*, karya dari seorang perempuan seniman bernama Sofia Hulten. Hulten membuat video instalasi yang mempertunjukkan serangkaian adegan tentang seorang perempuan berseragam abu-abu (seperti seragam kantor) sedang berada di suatu kantor. Perempuan yang wajahnya tak ditampakkan itu, menurut Tyler dan Cohen, seakan menyembunyikan diri. Ia menyembunyikan wajahnya di balik tirai jendela dan adegan berakhir saat perempuan itu memasukkan tubuhnya ke dalam kantong sampah besar.

Berangkat dari dua peristiwa yang kebetulan itu, Tyler dan Cohen (2010) mengembangkan penelitian yang berlatar pada kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh Judith Butler tentang performativitas gender dan Henri Lefebvre tentang ruang sebagai produksi sosial. Menurut Butler, gender dimaterialkan melalui serangkaian atribut dan tindakan yang ia sebut sebagai performativitas. Untuk dapat mematerialkan dirinya, tubuh membutuhkan ruang untuk bekerja; sementara ruang, di mana tubuh bekerja, tercipta melalui serangkaian produksi sosial. Artinya, ketika tubuh mematerialkan dirinya, ruang tempat ia mematerialkan dirinya tidaklah kosong. Ruang telah diisi oleh nilai-nilai dan ada nilai yang dominan, sehingga pertentangan-pertentangan tidak dapat dihindari tetapi harus diatasi untuk keberlanjutan keberadaan tubuh. Tubuh harus mempertahankan diri agar dapat diakui sebagai subyek yang ada dan dengan demikian lah tubuh dapat membentuk ruangnya (kembali) sehingga pada kelanjutannya tubuh tetap dapat terus mewujudkan/mengada.

Saya memosisikan penelitian ini dalam kerangka yang demikian, dengan waria sebagai subyek penelitian; dan dalam penelitian ini, saya berfokus pada waria yang tergabung di Perwakos. Perwakos adalah organisasi waria di kota Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 1978 dan sampai saat tesis ini ditulis telah mengembangkan empat CBO. Jangkauan mereka yang luas dan kekhususan mereka pada kelompok waria adalah alasan saya memilih untuk berfokus pada Perwakos.

Selanjutnya, pada penelitian ini, untuk mengetahui performativitas waria, saya menelusuri transformasi tubuhnya. Transformasi tubuh yang dimaksudkan dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan waria untuk melakukan perubahan dari tubuh laki-laki (berikut karakteristik yang mengikutinya) yang semula dilekatkan padanya ke tubuh waria yang dihasratinya. Dari transformasi tubuh inilah diketahui serangkaian atribut dan tindakan yang dipertunjukkan waria untuk membentuk gendernya. Kemudian, oleh karena latar penelitian adalah kota Surabaya yang pernah mendapatkan apresiasi sebagai kota yang mampu menangani PMKS dengan baik (Ariesman, 2012), maka perlu ditelusuri upaya-upaya waria untuk mempertahankan performativitasnya—mengingat bahwa waria dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dan menjadi salah satu sasaran dalam operasi razia. Lalu, langkah berikutnya adalah mempelajari praktik meruang waria yang direlasikan dengan gagasan ideal tentang ruang yang dibentuk oleh otoritas kota dan upaya waria untuk membentuk ruangnya serta menemukan makna dari keseluruhan pengalaman terkait upaya pembentukan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan penelitian berikut:

- 1) Apa yang dilakukan waria untuk melakukan transformasi tubuh dan bagaimana performativitasnya?



- 2) Apa yang dilakukan waria untuk mempertahankan performativitasnya?
- 3) Bagaimana waria membentuk ruangnya dan apa maknanya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) performativitas waria dari transformasi tubuhnya; 2) upaya-upaya yang dilakukan waria untuk mempertahankan performativitasnya; 3) upaya-upaya yang dilakukan waria untuk membentuk ruangnya dan makna dari keseluruhan pengalaman tersebut.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memberikan pengayaan terhadap pengalaman keseharian waria di kota Surabaya dalam mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh pengaturan kota yang heteronormatif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi untuk mengembangkan potensi kajian urban dan wilayah dalam kerangka kajian budaya.

### **E. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Kerangka pemikiran dalam tesis ini berlatar dari temuan Tyler dan Cohen (2010) tentang relasi antara performativitas gender dengan ruang organisasional. Dalam penelitiannya, Tyler dan Cohen (2010) membangun kerangka pemikirannya melalui pernyataan Butler bahwa gender diinstitusikan dalam ruang eksterior, yang mereka kaitkan dengan pandangan Lefebvre mengenai ruang sebagai produksi sosial.

Mengacu pada Butler, Tyler dan Cohen (2010) mengemukakan bahwa materialisasi tubuh didorong oleh hasrat untuk diakui sebagai subyek yang tampak. Materialisasi inilah yang menjadi alasan Butler kenapa gender adalah performativitas. Butler membedakan

performativitas dengan ekspresi. Konsep ini ia pinjam dari Jane Austen yang mengkategorikan makna menjadi dua, yakni makna konstantif yang merupakan ekspresi dan makna performatif yang merupakan makna pembentuk kenyataan (Alimi, 2004: 52). Performatif adalah atribusi dan tindakan, cara beragam bagaimana tubuh memproduksi signifikasi kultural. Dengan demikian, maka tidak ada identitas yang mendahului yang dijadikan ukuran untuk menilai atribusi atau tindakan; sehingga tidak ada tindakan gender yang menyimpang atau identitas gender sejati yang muncul sebagai pengatur (Butler, 1999: 180). Atau, dengan kata lain, apa yang dilakukan subyek bersifat konstitutif. Subyek tidak menginformasikan gendernya tetapi membentuk gendernya [(Alimi, 2011: 5) karena gender bukanlah suatu konstruk, tetapi dibentuk melalui serangkaian tindakan dan atribut, cara beragam tubuh menunjukkan dan memproduksi signifikasi kulturalnya.

Lalu, ketika tubuh membutuhkan ruang untuk mewujudkan dirinya, hal yang harus dipahami adalah bahwa ruang tidaklah kosong. Ruang selalu diisi oleh makna dan selalu berrelasi dengan tempat. Namun, tidak seperti geografer Yi Fu Tuan yang berpandangan bahwa ruang dan tempat adalah dua hal yang berbeda, yaitu suatu ruang yang diberi makna akan berubah menjadi tempat (Lazawardi, 2012: 10), Lefebvre berpandangan bahwa ruang dan tempat itu memiliki hubungan yang dialektis. Merrifield (1993: 519-520) mengemukakan bahwa relasi ruang-tempat Lefebvre dapat dipahami melalui konsep fetisisme komoditas Marx. Ruang tidaklah ada dengan begitu saja, tetapi—seperti komoditas—ada proses produksi di dalamnya, yang melibatkan relasi sosial di tempat tertentu sehingga ia kemudian menjadi bernilai. Lalu, sebagaimana fetisisme komoditas dalam pandangan Marx, Lefebvre mengatakan bahwa sebagaimana fetisisme komoditas [Marx], jebakannya adalah pada nilai tukarnya. Artinya, seperti barang yang ketika memasuki pasar nilai tukarnya menjadi lebih penting dibandingkan proses produksi yang dilakukan oleh kaum buruh dengan segala macam perjuangan mereka, nilai ruang juga menjadi lebih penting dibandingkan proses



produksi yang melibatkan kompleksitas sosial di dalamnya; sehingga ruang kemudian cenderung dipandang terjadi dengan sendirinya dan nilai yang melekat padanya adalah nilai yang tetap.

Landasan berpikir tersebutlah yang lantas membuat Lefebvre mengembangkan teori ruang sebagai produksi sosial dengan prinsip tiga dimensinya, yang terdiri dari: 1) praktik meruang (*spatial practices*); 2) representasi ruang (*the representation of space*); 3) ruang representasi (*spaces of representation*) (Schmid, 2008). Untuk memahami prinsip tiga dimensi ini, saya merujuk pada interpretasi Schmid terhadap Lefebvre karena Schmid menyediakan penjelasan yang memadai tentang latar dari tiga prinsip yang oleh Schmid disebut trinitas Marx-Hegel-Nietzsche. Materialisme-dialektika Marx untuk prinsip pertama, universalisme Hegel untuk prinsip kedua, dan estetika Nietzsche untuk prinsip ketiga. Menurut Schmid, trinitas ini tidak dapat dilepaskan satu sama lain, tetapi harus dipahami sebagai prinsip yang saling berhubungan dan berkesinambungan.